

INKLUSIVITAS POLITIK ERA DIGITAL

**PERSPEKTIF KRITIS DARI ANALISIS
SENTIMEN DAN TOPIK**

**Dr. Rupiarsieh, M.Si, Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si
Dr. Eko Wahyu Abryandoko, S.Pd., M.T
Dr. Ir. Agustinus Bimo Gumelar**

INKLUSIVITAS POLITIK ERA DIGITAL

Perspektif Kritis *dari* Analisis
Sentimen *dan* Topik

Dr. Rupiarsieh, M.Si
Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si
Dr. Eko Wahyu Abryandoko.,S.pd.,M.T
Dr. Ir. Agustinus Bimo Gumelar



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

INKLUSIVITAS POLITIK ERA DIGITAL

Perspektif Kritis dari Analisis Sentimen dan Topik.

Copyright @ 2025 Dr. Rupiarsieh, M.Si dkk.

All right reserved

Penulis

Dr. Rupiarsieh, M.Si
Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si
Dr. Eko Wahyu Abryandoko.,S.pd.,M.T
Dr. Ir. Agustinus Bimo Gumelar

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
[www. penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

[naskah@penerbitkbm. com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-981-7

Cetakan ke-1, Desember 2025
14,8 x 21 cm, x + 163 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan karena buku *Inklusivitas Politik Era Digital: Perspektif Kritis dari Analisis Sentimen dan Topik* akhirnya rampung. Dorongan untuk menulis buku ini lahir dari kerisauan sekaligus optimisme: kerisauan karena kesenjangan partisipasi politik kelompok difabel, perempuan, dan pemilih pemula masih terasa, serta optimisme karena ruang digital membuka peluang baru untuk mengurangi ketimpangan itu.

Buku ini bertujuan menghubungkan riset *big data* dengan praktik kebijakan. Analisis sentimen dan topik atas jutaan unggahan media sosial memberi gambaran granular tentang hambatan dan harapan warga. Temuan kuantitatif diperkaya pembacaan kualitatif, lalu diterjemahkan menjadi strategi kurikulum, komunikasi, dan kebijakan inklusif. Harapannya, buku ini bisa menjadi jembatan antara dunia akademik, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan pembaca umum yang ingin memahami isu demokrasi inklusif secara lebih mendalam.

Struktur buku dirancang berjenjang. Bab 1 membuka konsep dan ruang lingkup inklusivitas. Bab 2 memetakan media sosial sebagai arena politik baru. Bab 3 menjelaskan metodologi analisis data, sedangkan Bab 4 menyajikan hasil empiris. Bab 5

menginterpretasikan temuan dalam kerangka hambatan dan peluang, diikuti Bab 6 yang merumuskan strategi pendidikan politik inklusif berbasis bukti. Bab 7 menutup dengan rekomendasi dan arah masa depan. Lampiran menyediakan kata kunci, panduan metodologi tambahan, dan daftar pustaka terkini.

Penulis berterima kasih kepada banyak pihak. Terima kasih kepada para peneliti data yang membantu proses pembersihan korpus, organisasi penyandang disabilitas yang bersedia berdiskusi tentang pengalaman nyata di TPS, serta rekan akademisi yang memberikan masukan kritis. Dukungan Komisi Pemilihan Umum dalam menyediakan sebagian dataset resmi sangat berarti. Tak kalah penting, apresiasi kepada keluarga dan sahabat yang memberi ruang, waktu, dan semangat selama proses penulisan.

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Data media sosial bersifat dinamis dan tidak selalu mewakili populasi secara seimbang. Meski demikian, penulis berharap kerangka analisis dan rekomendasi di dalam buku ini dapat memicu diskusi lanjut, riset replikasi, dan kebijakan nyata yang lebih berpihak pada prinsip demokrasi inklusif.

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumbangan kecil bagi terwujudnya partisipasi politik setara bagi semua warga.

Surabaya, Juli 2025

Dr. Rupiarseh, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
INKLUSIVITAS POLITIK: KONSEP, KESENJANGAN, DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL.....	1
1.1. Definisi dan Pilar Inklusivitas Politik	2
1.2. Kerangka Regulasi dan Hukum Indonesia	6
1.3. Data Kesenjangan Politik Marginal.....	10
1.4. Hambatan Sosial dan Kultural	13
1.5. Peran Institusi Politik dan Pemerintah	16
MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA POLITIK BARU	21
2.1. Media Sosial & Opini Publik.....	22
2.2. Perpindahan Opini Publik ke Ruang Digital	25
2.3. Politisasi dan Polarisasi di Platform Digital	27
2.4. Panggung Digital Kelompok Marginal.....	29
2.5. Tantangan Etika dan Literasi Digital	33
DARI DATA KE NARASI: METODOLOGI ANALISIS SENTIMEN DAN TOPIK	37
3.1. Pendekatan Mixed Methods	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data Media Sosial	42
3.3. Validasi dan Reliabilitas Data.....	45
3.4. Metodologi : IndoBERT dan LDA	48

3.5.	Prosedur Analisis Sentimen.....	51
3.6.	Prosedur Analisis Topik	55
3.7.	Ringkasan Alur Analisis	62
SUARA DIFABEL, PEREMPUAN, DAN PEMILIH PEMULA: HASIL ANALISIS.....		67
4.1.	Distribusi dan Tren Sentimen	68
4.2.	Tema-tema Dominan	72
4.3.	Cuplikan Unggahan sebagai Narasi	77
4.4.	Variasi Sentimen Berdasarkan Waktu dan Isu	81
4.5.	Perbandingan Subkelompok	84
INTERPRETASI TEMUAN: HAMBATAN, PELUANG, DAN HARAPAN.....		89
5.1.	Hambatan Struktural dan Psikososial.....	90
5.2.	Persepsi Ketimpangan Akses dan Informasi	96
5.3.	Narasi Harapan	102
5.4.	Membangun Kepercayaan Digital	107
5.5.	Peluang Intervensi Strategis	110
MENYUSUN STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK INKLUSIF BERBASIS BUKTI		117
6.1.	Dari Data Menjadi Aksi.....	118
6.2.	Menyusun Kurikulum Politik yang Inklusif.....	120
6.3.	Rekomendasi untuk KPU dan Pemda	122
6.4.	Jembatan Komunikasi Digital	124
6.5.	Membangun Ekosistem Kolaboratif.....	126
REKOMENDASI DAN ARAH MASA DEPAN DEMOKRASI INKLUSIF.....		131
7.1.	Refleksi Temuan Utama	132
7.2.	Implikasi Akademik dan Praktis	133
7.3.	Potensi Replikasi dan Kolaborasi Lintas Sektor	137
7.4.	Arah Riset dan Advokasi Selanjutnya	139
7.5.	Seruan untuk Aksi Inklusif Berbasis Bukti	141

GLOSARIUM 145

DAFTAR PUSTAKA 151

BIOGRAFI PENULIS..... 161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Diagram Empat Pilar Inklusivitas Politik	3
Gambar 1.2. Diagram Konsep Interseksionalitas.	15
Gambar 2.1. Ilustrasi Pergeseran Model Komunikasi.	23
Gambar 2.2. Tiga Fase Isu Digital.	26
Gambar 2.3. Diagram Tiga Dimensi Representasi.....	31
Gambar 3.1. Diagram Alur Desain Sekuensial Eksploratori.	39
Gambar 3.2. Tahapan Filtrasi Data	43
Gambar 3.3. Contoh Confusion Matrix	54
Gambar 3.4. Grafik Pemilihan Jumlah Topik (K)	58
Gambar 3.5. Diagram Alur Metodologi Penelitian.....	63
Gambar 4.1. Diagram Proporsi Sentimen Agregat.	69
Gambar 4.2. Grafik Tren Sentimen dari Waktu ke Waktu	69
Gambar 4.3. Perbandingan Sentimen Negatif	71
Gambar 4.4. Gugus Hambatan Aksesibilitas TPS	72
Gambar 4.5. Diagram Dimensi Representasi Gender.....	74
Gambar 4.6. Infografik Lima Dimensi Literasi Politik	76
Gambar 4.7. Perbandingan Tren Sentimen	83
Gambar 5.1. Diagram Alur Siklus Umpan Balik Negatif	93
Gambar 5.2. Diagram Alur Spiral Kepercayaan Negatif.....	99
Gambar 6.1. Diagram Alur Logika Kebijakan Berbasis Bukti	119
Gambar 6.2. Diagram Piramida Kurikulum Inklusif	121
Gambar 6.3. Diagram Ekosistem Aliansi Multipihak.	127
Gambar 7.1. Diagram Ekosistem Kolaborasi Inklusivitas.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kesenjangan Partisipasi Politik	11
Tabel 3.1. Ringkasan Proses Validasi dan Reliabilitas	47
Tabel 3.2. Perbandingan Metode Analisis Teks	49
Tabel 3.3. Metrik Utama Evaluasi Kinerja Model Sentimen	53
Tabel 3.4. Contoh Matriks Sentimen per Topik	60
Tabel 4.1. Pemetaan Kebutuhan Kelompok	86
Tabel 5.1. Contoh Pemetaan Friksi dalam Matriks Partisipasi	94
Tabel 5.2. Ukuran Keberhasilan Inklusivitas	114
Tabel 6.1. Rekomendasi Kebijakan Institusi	123
Tabel 7.1. Ringkasan Implikasi Akademik dan Praktis	136
Tabel 7.2. Ringkasan Arah Riset dan Advokasi Masa Depan	141

GLOSARIUM

Glosarium ini memuat penjelasan ringkas untuk beberapa istilah kunci yang digunakan secara konsisten di sepanjang buku. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca, terutama yang berasal dari latar belakang non-hukum atau non-teknik, untuk memahami konteks penggunaan setiap istilah.

1. Akses Difabel Kondisi infrastruktur, informasi, dan layanan yang memungkinkan warga penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu secara mandiri dan bermartabat.
2. Agensi Kapasitas atau kekuatan yang dimiliki sebuah kelompok untuk secara aktif memulai, mengubah, atau menolak sebuah isu, sehingga mereka menjadi subjek aktif dalam politik, bukan sekadar objek.
3. Akuntabilitas Kewajiban dan tingkat responsivitas institusi (seperti KPU atau pemerintah) untuk menanggapi serta menindaklanjuti aspirasi, masukan, atau keluhan dari publik.
4. Audio Deskripsi Narasi atau penjelasan tambahan dalam format audio yang menggambarkan elemen-elemen visual penting dalam sebuah video atau presentasi, ditujukan bagi audiens dengan hambatan penglihatan.
5. Audit TPS Proses pemeriksaan dan penilaian sistematis terhadap kesesuaian fasilitas dan layanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan standar aksesibilitas yang telah ditetapkan.
6. Bahasa Isyarat Sistem komunikasi visual yang menggunakan gerak tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh, terutama digunakan oleh komunitas Tuli untuk berkomunikasi.
7. Braille Sistem tulisan sentuh berupa titik-titik timbul yang memungkinkan individu dengan hambatan penglihatan (netra) untuk membaca.

8. Calon Perempuan Individu berjenis kelamin perempuan yang terdaftar secara resmi dan bersaing sebagai kandidat dalam sebuah kontestasi pemilihan umum.
9. Figur Panutan (*Role Model*) Seorang tokoh publik yang tindakan, prestasi, atau karakternya menjadi sumber inspirasi dan contoh positif bagi orang lain, khususnya dalam konteks keterlibatan politik.
10. Hak Pilih Hak fundamental yang dijamin secara hukum bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
11. Hoaks Pemilu Informasi yang sengaja dibuat salah atau menyesatkan terkait proses, tahapan, kandidat, atau hasil pemilihan umum, dengan tujuan untuk mengacaukan atau memengaruhi opini publik.
12. Jalur Landai (*Ramp*) Sebuah lintasan miring tanpa undakan yang dirancang untuk memudahkan akses bagi pengguna kursi roda, pejalan kaki yang menggunakan alat bantu, atau kereta bayi.
13. Kesetaraan Gender Prinsip yang menyatakan bahwa semua gender memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam partisipasi dan representasi politik.
14. Keterbukaan Data Kebijakan dan praktik membuka dataset atau informasi yang dimiliki oleh lembaga publik agar dapat diakses, digunakan, dan didistribusikan secara bebas oleh masyarakat luas.
15. Kontras Tinggi Kombinasi warna antara teks dan latar belakang yang memiliki perbedaan kecerahan signifikan (misalnya, teks hitam di atas latar putih), dirancang untuk memudahkan pembacaan bagi individu dengan penglihatan rendah (*low vision*).

16. Kursi Roda Alat bantu mobilitas beroda yang digunakan oleh individu yang mengalami kesulitan berjalan, yang memerlukan ruang gerak dan permukaan yang rata serta bebas hambatan.
17. Kuota Perempuan Kebijakan tindakan afirmatif yang menetapkan persentase minimum jumlah calon legislatif perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu.
18. Laporan Akses Pengaduan atau masukan resmi maupun tidak resmi dari publik mengenai adanya hambatan, baik fisik maupun informasional, dalam proses pemilu.
19. Literasi Digital Serangkaian kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital.
20. Literasi Politik Kemampuan warga untuk memahami cara kerja sistem politik, aktor, institusi, serta isu-isu kebijakan, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan politik secara kritis dan terinformasi.
21. Meja Suara Permukaan atau fasilitas tempat pemilih melakukan penandaan atau pencoblosan surat suara. Ketinggian dan desainnya perlu disesuaikan agar aksesibel bagi semua orang, termasuk pengguna kursi roda.
22. Partisipasi Difabel Keterlibatan aktif dan bermakna dari warga penyandang disabilitas dalam seluruh proses dan tahapan politik, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun kandidat.
23. Pencahayaan TPS Tingkat terang cahaya di area TPS, khususnya di dalam bilik suara, yang harus memadai agar semua pemilih, termasuk yang memiliki penglihatan rendah, dapat membaca surat suara dengan jelas.

24. Pindah Memilih Proses administrasi yang memungkinkan seorang pemilih yang terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda dari lokasi di mana ia terdaftar semula.
25. Prosedur Pemilu Serangkaian tahapan resmi yang diatur oleh hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil.
26. Representasi Substantif Tingkat keterwakilan yang melampaui kehadiran fisik atau jumlah semata. Representasi ini terwujud ketika perwakilan dari sebuah kelompok mampu secara aktif menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi kebijakan agar selaras dengan kepentingan dan pengalaman kelompok yang diwakilinya.
27. Respons KPU Tanggapan, jawaban, atau tindakan korektif yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu terhadap pertanyaan, masukan, atau laporan dari publik.
28. Simulasi e-Coklit Program latihan atau uji coba proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih yang dilakukan secara elektronik atau daring.
29. Subtitle Teks dialog atau narasi yang ditampilkan di bagian bawah layar video, berfungsi sebagai alat bantu bagi audiens Tuli, Hard of Hearing (HoH), atau siapa pun yang menonton tanpa suara.
30. Teks Alternatif (*Alt Text*) Deskripsi teks singkat yang disematkan pada sebuah gambar di platform digital. Deskripsi ini tidak terlihat secara visual, namun dapat dibaca oleh perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*) untuk menjelaskan isi gambar kepada pengguna dengan hambatan penglihatan.

31. Tokenisme Praktik memberikan perlakuan simbolis atau gestur dangkal kepada kelompok marginal (misalnya, memenuhi kuota keterwakilan) untuk menciptakan kesan inklusif, tanpa memberikan pengaruh atau kekuatan yang substantif.
32. Tutorial KPU Materi panduan, baik dalam format video maupun teks, yang dirilis secara resmi oleh KPU untuk menjelaskan cara penggunaan aplikasi atau layanan yang mereka sediakan.
33. Verifikasi Fakta Proses sistematis untuk memeriksa dan memastikan akurasi serta kebenaran dari sebuah informasi atau klaim, terutama yang beredar di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. VERBA S, SCHLOZMAN KL, BRADY HE. *Voice and Equality* [Internet]. Harvard University Press; 1995. Available from: <http://www.jstor.org/stable/j.ctv1pncik7>
2. Fraser N. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Soc Text* [Internet]. 1990 Jul 21;(25/26):56. Available from: <http://www.jstor.org/stable/466240>
3. Dean Rikki. Deliberating Like a State: Locating Public Administration Within the Deliberative System. *Polit Stud* [Internet]. 2023 Apr 25;72(3):924–43. Available from: <https://doi.org/10.1177/00323217231166285>
4. Fung A. *Varieties of Public Participation in Complex Governance*. Public Adm Rev - PUBLIC ADMIN REV. 2006 Dec 1;66:66–75.
5. Sen A. *Development as Freedom* [Internet]. Oxford University Press; 1999. (Oxford India paperbacks). Available from: <https://books.google.co.id/books?id=NQs75PEa6i8C>
6. Gracia P. Book Review: The Digital Disconnect: The Social Causes and Consequences of Digital Inequalities. *New Media Soc*. 2021 Dec 7;24:250–1.
7. Lister M, Dovey J, Giddings S, Grant I, Kelly K. *New Media: A Critical Introduction*. In 2003. p. 404.
8. Pemerintah Republik Indonesia (Indonesia PP. Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Sekretariat Negara (dalam LN tercatat “LL SETNEG”); 2017. p. 317 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
9. Pemerintah Republik Indonesia (Indonesia PP. Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan

- Kuangan Negara. 2016 [cited 2025 Jul 22]. p. 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
10. Pemerintah Republik Indonesia (Indonesia PP. Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Kuangan Negara. 2024 [cited 2025 Jul 22]. p. 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
 11. Muharam RS, Pradhanawati A, Fitriyah F, Supratiwi S. Fulfillment of women's political rights through mainstreaming gender quotas in Election Supervisory Board. *Otoritas J Ilmu Pemerintah* [Internet]. 2023 Dec 26;13(3):406–23. Available from: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12691>
 12. Kadriyah SM. Women's Representation and Accessibility in Indonesian Politics: A Study of Jakarta Regional People's Representative Council. *J Polit* [Internet]. 2023 Aug 25;9(2). Available from: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol9/iss2/4/>
 13. TEORELL J, TORCAL M. Political participation: Mapping the terrain. In: *Citizenship and Involvement in European Democracies* [Internet]. 1st ed. Routledge; 2007. p. 358–81. Available from: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781134126811/chapters/10.4324/9780203965757-24>

14. Verba S, Nie NH. Participation in *America: Political Democracy and Social Equality*. Chicago: University of Chicago Press; 1987. 452 p.
15. Temby Q, Hu B. Polarisation on- and off-line in Indonesia's 2019 Presidential Elections. *Perspect ISEAS-Yusof Ishak Inst.* 2019;(26):1-9.
16. Gayo-Avello D. A Meta-Analysis of State-of-the-Art Electoral Prediction From Twitter Data. *Soc Sci Comput Rev.* 2013 Dec 1;31:649-79.
17. Ceron A, Curini L, Iacus S. Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media. *Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media.* 2016. 1-178 p.
18. Aspinall Edward, White Sally, Savirani Amalinda. Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *J Curr Southeast Asian Aff* [Internet]. 2021 Apr 1;40(1):3-27. Available from: <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
19. Hughes B. *Disability and the Body*. In 2014. p. 55-61.
20. Ging D, Siapera E. Special issue on online misogyny. *Fem Media Stud* [Internet]. 2018;18(4):515-24. Available from: <http://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447345>
21. Crenshaw K. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. *Living With Contradict Controv Fem Soc Ethics.* 2018;1989(1):39-52.
22. Yu H, Robinson DG. The New Ambiguity of "Open Government." *SSRN Electron J* [Internet]. 2012;31. Available from: <http://www.ssrn.com/abstract=2012489>
23. Fisher J, Fieldhouse E, Franklin MN, Gibson R, Cantijoch M, Wlezien C. the Routledge Handbook of Elections,

- Voting Behavior and Public Opinion. The Routledge Handbook of Elections, *Voting Behavior and Public Opinion*. 2017. 1–550 p.
24. Kittilson MC. Party Politics. In: Waylen G, Celis K, Kantola J, Weldon SL, editors. *The Oxford Handbook of Gender and Politics* [Internet]. Oxford University Press; 2013. p. o. Available from: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199751457.013.0021>
 25. Abbey R. Cass R. Sunstein. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media . Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017. Pp. xi+310. \$29.95. *Am Polit Thought* [Internet]. 2018 Mar 1;7(2):370–3. Available from: <http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/696988>
 26. Tucker J, Guess A, Barbera P, Vaccari C, Siegel A, Sanovich S, et al. Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. *SSRN Electron J*. 2018 Jan 1;
 27. Laer J, Aelst P. Internet and Social Movement Action Repertoires. *Information*. 2010 Dec 1; *Communication & Society*:1146–71.
 28. Bennett L, Segerberg A. The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Log Connect Action Digit Media Pers Contentious Polit*. 2012 Jan 1;15:1–240.
 29. Schillemans T. *The hybrid media system: Politics and power*. Public Adm. 2014 Dec 1;92.
 30. Vissers S, Stolle D. The Internet and new modes of political participation: Online versus offline participation. *Information*. 2014 Sep 14;17.
 31. Bruns A, Highfield T, Burgess J. The Arab Spring and Social Media Audiences English and Arabic Twitter Users and Their Networks. *Am Behav Sci*. 2013 Jul 1;57:871–98.

32. Rowland F. The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You (review). *portal Libr Acad* [Internet]. 2011 Oct;11(4):1009–11. Available from: <https://muse.jhu.edu/article/452645>
33. Ross K, Evans E, Harrison L, Shears M, Wadia K. The Gender of News and News of Gender A Study of Sex, Politics, and Press Coverage of the 2010 British General Election. *Int J Press*. 2013 Jan 1;18:3–20.
34. Shepherd J. Disability and the media. *Disabil Soc*. 2016 Nov 4;32:1–2.
35. Creswell JW, Clark VLP. *Designing and Conducting Mixed Methods Research* [Internet]. SAGE Publications; 2017. 520 p. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=eTwmDwAAQBAJ>
36. Tashakkori A, Teddlie C. *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research* [Internet]. SAGE Publications; 2003. 768 p. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=F8BFOM8DCKoC>
37. Denzin NK. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* [Internet]. Routledge; 2017. 368 p. (Methodological perspectives). Available from: <https://books.google.co.id/books?id=UjcpxFEoT4cC>
38. Wilie B, Vincentio K, Winata G, Li X, Lim Z, Soleman S, et al. *IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding*. 2020.
39. Blei D, Ng A, Jordan M. Latent Dirichlet Allocation. Vol. 3, *The Journal of Machine Learning Research*. 2001. 601–608 p.
40. Bruns A, Stieglitz S. Towards More Systematic Twitter Analysis: Metrics for Tweeting Activities. *Int J Soc Res Methodol*. 2013 Mar 1;16:91–108.
41. Broder A. On the Resemblance and Containment of

- Documents. *Proceedings of the International Conference on Compression and Complexity of Sequences*. 1997.
42. Guest G, Bunce A, Johnson L. *How Many Interviews Are Enough?* *F Methods - F METHOD*. 2006 Feb 1;18:59–82.
 43. Ferrara E, Varol O, Davis C, Menczer F, Flammini A. The Rise of Social Bots. *Commun ACM*. 2014 Jul 19;59.
 44. Cohen J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educ Psychol Meas*. 1960;20(1):37–46.
 45. Krippendorff K. *Computing Krippendorff's Alpha-Reliability*. 2011.
 46. Devlin J, Chang MW, Lee K, Toutanova K. *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. 2018.
 47. Manning CD, Raghavan P, Schütze H. *Introduction to Information Retrieval* [Internet]. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. Available from: <https://www.cambridge.org/core/product/669D108D20F556C5C30957D63B5AB65C>
 48. Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *Ann Stat* [Internet]. 1979 Jan 1;7(1). Available from: <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/volume-7/issue-1/Bootstrap-Methods-Another-Look-at-the-Jackknife/10.1214/aos/1176344552.full>
 49. Mehrabi N, Morstatter F, Saxena N, Lerman K, Galstyan A. A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning. *ACM Comput Surv*. 2021 Jul 1;54:1–35.
 50. Jurafsky M. *Speech and Language Processing An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models Third Edition draft Summary of Contents*. Women's Hum Rights. 2014;vii–x.
 51. Röder M, Both A, Hinneburg A. Exploring the Space of

- Topic Coherence Measures. *WSDM 2015 - Proc 8th ACM Int Conf Web Search Data Min.* 2015 Feb 2;399–408.
52. Krippendorff K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* [Internet]. SAGE Publications; 2018. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=nEiaDwAAQBAJ>
 53. Nunes JL, Barbosa G, de Souza C, Barbosa S. Using Model Cards for ethical reflection on machine learning models: an interview-based study. *J Interact Syst.* 2024 Jan 1;15:1–19.
 54. General Election Network for Disability Access (AGENDA) & Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR); didukung IFES. 2014 Presidential Elections in Indonesia: Monitoring Results from Aceh, Jakarta, Central Java, South Kalimantan and South Sulawesi. Jakarta; 2015.
 55. Fernandes A, Suryahudaya EG, Okhtariza N. Pemilu Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis , Adaptif dan Responsif. *Cent Strateg Int Stud* [Internet]. 2023;8. Available from: https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Pemilih_Muda_Dalam_Pemilihan_Umum_2024.pdf?download=1
 56. Gupta K, Jenkins-Smith H. Anthony Downs, “Up and Down with Ecology: The ‘Issue-Attention’ Cycle.” In 2016. p. 316–25.
 57. Kingdon JW. *Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nd Edition (Longman Classics in Political Science)*. Longman Pub Group; 2002. 280 p.
 58. Hug T. *Microlearning : A New Pedagogical Challenge*. 2006. 7–11 p.
 59. Kanter RM. Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women. *Am J Sociol* [Internet]. 1977 Mar;82(5):965–90. Available from: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/226425>

60. Bandura A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychol Rev.* 1977 Mar 1;84:191-215.
61. Tversky A, Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science* (80-) [Internet]. 1974 Sep 27;185(4157):1124-31. Available from: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.185.4157.1124>
62. Colquitt JA. On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *J Appl Psychol* [Internet]. 2001 Jun;86(3):386-400. Available from: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.86.3.386>
63. van Deursen AJAM, Helsper EJ. *The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?* In 2015. p. 29-52. Available from: <http://www.emerald.com/books/edited-volume/11159/chapter/80957701>
64. Nabatchi T, Leighninger M. *Public Participation for 21st Century Democracy.* 2015.
65. Pawson R. *Evidence-Based Policy: A Realist Perspective* [Internet]. SAGE Publications; 2006. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=XNhGhWiXgDcC>
66. Pea RD. The Social and Technological Dimensions of Scaffolding and Related Theoretical Concepts for Learning, Education, and Human Activity. *J Learn Sci* [Internet]. 2004 Jul;13(3):423-51. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327809jl1303_6
67. Topping KJ. The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and review of the literature. *High Educ* [Internet]. 1996 Oct;32(3):321-45. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/BF00138870>
68. Herron ES, Pekkanen R, Shugart MS. *The Oxford*

- Handbook of Electoral Systems [Internet]. *Oxford University Press*; 2018. (Oxford handbooks). Available from:
<https://books.google.co.id/books?id=H5NODwAAQBAJ>
69. FUNG A, WRIGHT EO. Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. *Polit Soc* [Internet]. 2001 Mar 1;29(1):5–41. Available from: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032329201029001002>
 70. Rose D, Meyer A. *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design For Learning*. Alexandria, VA, ASCD. 2002.
 71. Villamediana J, Küster I, Vila N. Destination engagement on Facebook: Time and seasonality. *Ann Tour Res* [Internet]. 2019 Nov;79:102747. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0160738319301045>
 72. Schriver KA. Plain Language in the US Gains Momentum: 1940–2015. *IEEE Trans Prof Commun* [Internet]. 2017 Dec;60(4):343–83. Available from: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8115322/>
 73. Grunig JE. Two-Way Symmetrical Public Relations: Past, Present, and Future. In: *Handbook of Public Relations* [Internet]. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc.; 2001. p. 11–30. Available from: <https://sk.sagepub.com/reference/handbook-of-public-relations/n1.xml>
 74. Cairney P. *The Politics of Evidence-Based Policy Making* [Internet]. London: Palgrave Macmillan UK; 2016. Available from: <http://link.springer.com/10.1057/978-1-137-51781-4>

75. Menard S. *Handbook of Longitudinal Research: Design, Measurement, and Analysis* Editor. 2008 Jan 1;
76. Hamari J, Koivisto J, Sarsa H. Does Gamification Work? -- A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. In: 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences [Internet]. *IEEE*; 2014. p. 3025–34. Available from: <http://ieeexplore.ieee.org/document/6758978/>
77. Buolamwini J, Gebu T. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. In: Friedler SA, Wilson C, editors. Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency [Internet]. *PMLR*; 2018. p. 77–91. (Proceedings of Machine Learning Research; vol. 81). Available from: <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>
78. Seok S, DaCosta B, Hodges R. A Systematic Review of Empirically Based Universal Design for Learning: Implementation and Effectiveness of Universal Design in Education for Students with and without Disabilities at the Postsecondary Level. *Open J Soc Sci* [Internet]. 2018;6(5). Available from: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udpri nciples.htm
79. Pasquale F. *The Black Box Society* [Internet]. Harvard University Press; 2015. Available from: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.4159/harvard.9780674736061/html>

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Rupiar sieh, M.Si

Rupiar sieh merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas Bojonegoro (UNIGORO) Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Dekan FISIP. Ia memperoleh gelar sarjana dalam Hubungan Internasional dari Universitas Negeri Jember Indonesia pada tahun 1986 dan gelar magister

dalam ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada Indonesia pada tahun 1995. Gelar doktor dalam Ilmu Administrasi diperoleh dari Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Indonesia, pada tahun 2007. Minat penelitiannya meliputi kebijakan sosial dan politik, teknologi pendidikan, dan manajemen hubungan pelanggan (CRM). Dapat dihubungi melalui email: arsieh_sakti@yahoo.com.



Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si

Dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro yang menekuni bidang kebijakan dan manajemen publik. Lahir di Bojonegoro, 27 April 1989. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro tahun 2012, menyelesaikan studi S2 pada

Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra tahun 2014 dan menyelesaikan studi S3 Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2024. Selama menjalani karir sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro dan sekarang menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro. Penulis juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian yang dibiayai oleh Dikti dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDD), skema Penelitian Disertasi Doktor (PDD) dan skema Penelitian Fundamental Reguler (PFR).



Dr. Eko Wahyu Abryandoko.,S.pd.,MT

Eko Wahyu Abryandoko merupakan dosen di Universitas Bojonegoro, Indonesia. Ia memperoleh gelar Doktor dalam bidang Teknik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. Minat penelitiannya meliputi desain mekanik, kontrol adaptif, Sistem Teknik Pengembangan Produk, Teknologi Bantu, dan Teknik Biomedis.



Agustinus Bimo Gumelar

Agustinus **Bimo** Gumelar (Dr.), Insinyur (Ir.) dalam bidang Komputasi Afektif Neurosains – Peneliti Profesional dibidang Interaksi Manusia-Komputer (HCI). Spesialisasi dalam bidang ilmu saraf afektif pada komputasi neuromorfis, dan interaksi manusia-komputer (HCI) dengan fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan (CX) melalui teknologi inovatif.